

# LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN

# 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN

# 2022



# **Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2022**

ISBN: -

Katalog: 1202062

Ukuran buku: 21cm x 29,7cm

Jumlah halaman: x + 46 halaman

Naskah:

Biro Perencanaan

Penyunting:

Biro Perencanaan

Desain Kover:

Biro Perencanaan

Penerbit:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja eselon II instansi di BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Biro Perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Biro Perencanaan.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Biro Perencanaan terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022, perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir serta efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2022. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Biro Perencanaan BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan kinerja Biro Perencanaan di masa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepala Biro Perencanaan,



M Nashrul Wajdi



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.3 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran.....	6
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>17</b>
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	19
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022.....	29
3.3 Prestasi dan Inovasi Tahun 2022.....	29
3.4 Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	30
3.5 Realisasi dan Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2022 .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>39</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Pagu Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2022 (dalam jutaan rupiah) .....	7
Tabel 2. Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 ...	13
Tabel 4. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Perencanaan .....	20
Menurut Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	20
Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu” Tahun 2021 s.d 2022 .....	20
Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS” .....	24
Tahun 2021 s.d 2022 .....	24
Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik” .....	26
Tahun 2021 s.d 2022 .....	26
Tabel 8. Realisasi Kinerja Berdasarkan IKU Biro Perencanaan Tahun 2022 .....	30
Tabel 9. Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Akhir Biro Perencanaan Tahun 2022 .....	31
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2022.....	32
Tabel 11. Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Nilai Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2022 .....	32

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Bina Program Sebelum Pemberlakuan .....	5
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan .....	5
Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020.....	5
Gambar 3. Proporsi Pegawai Biro Perencanaan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	6
Gambar 4. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Perencanaan 2020-2024 .....	12
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
Gambar 6. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2020 - 2022 .....	19
Gambar 7. Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu Tahun 2020-2022 .....	22
Gambar 8. Capaian Kinerja Biro Perencanaan 2018 s.d 2022.....	29
Gambar 9. Piagam Penghargaan Kearsipan .....	29



# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran

1	Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 .....	41
2	Pernyataan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 .....	43
3	Pengukuran Kinerja Biro Perencanaan Terhadap Rencana Strategis dan PK Tahunan Tahun 2022 .....	45

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik.

Pada tahun 2022, capaian kinerja Biro Perencanaan mencapai 100,17 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 0,55 poin dan dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Perencanaan di tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun, capaian kinerja Biro Perencanaan terhadap total cukup fluktuatif. Realisasi capaian kinerja terendah ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,60 persen. Hal ini juga dikarenakan tahun 2020 merupakan periode pertama dari Renstra 2020-2024 sehingga merupakan nilai *baseline*. Capaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2022 yaitu sebesar 100,17 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa Biro Perencanaan secara terus menerus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan.

Penyerapan anggaran yang dikelola oleh Biro Perencanaan di tahun 2022 sebesar Rp9.847.281.897 atau 95,42 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 5,79 poin. Sasaran strategis “meningkatnya birokrasi yang akuntabel” memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu 99,97 persen.

Biro Perencanaan juga telah melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran. Terdapat dua sasaran strategis yang memiliki nilai capaian kinerja lebih tinggi dibanding realisasi anggaran yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada dua sasaran strategis tersebut. Berdasarkan rata-rata sasaran, capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Biro Perencanaan telah melakukan upaya efisiensi anggaran di tahun 2022.



# 1

# PENDAHULUAN

---





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Biro Perencanaan yang merupakan unit kerja eselon II BPS di bawah Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan transformasi statistik.

Salah satu perubahan mendasar sebagai implementasi dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 adalah perubahan pola kerja yang semula adalah berbasis struktural dimana Biro Bina Program (sebelum berubah nomenklatur) terdiri atas empat bagian yaitu Bagian Penyusunan Rencana, Bagian Penyusunan Anggaran, Bagian Monitoring dan Evaluasi serta Bagian Transformasi Statistik, dimana setiap bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Dengan peraturan baru tersebut, pejabat struktural berubah menjadi jabatan fungsional. Mulai akhir tahun 2020, perubahan pola kerja baru diimplementasikan secara bertahap. Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan.

Biro Perencanaan BPS dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya yaitu Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran. Adapun sasaran strategis yang dirumuskan yaitu (1)Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu, (2)Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, (3)Terlaksananya transformasi statistik BPS, dan (4)Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS.

Rencana Strategis Biro Perencanaan 2020-2024 telah disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dicapai Biro Perencanaan selama lima tahun ke depan. Di awal tahun 2022, Biro Perencanaan juga telah melakukan Reviu Renstra Biro Perencanaan 2020-2024 untuk penyesuaian target sampai dengan 2024. Untuk mengukur keberhasilan Biro Perencanaan dalam pencapaian kegiatan tahun 2022, maka pada awal tahun 2022 juga telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2022. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan 2022. Sedangkan Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan BPS tahun 2020-2024, sehingga dalam laporan ini juga berisi perbandingan dan evaluasi capaian kinerja

tahun 2022 dengan tahun 2021. Diharapkan laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

## **1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan menyelenggarakan statistik dasar. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

### **a. Tugas**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
- 3) Monitoring dan evaluasi; dan
- 4) Pelaksanaan transformasi statistik.

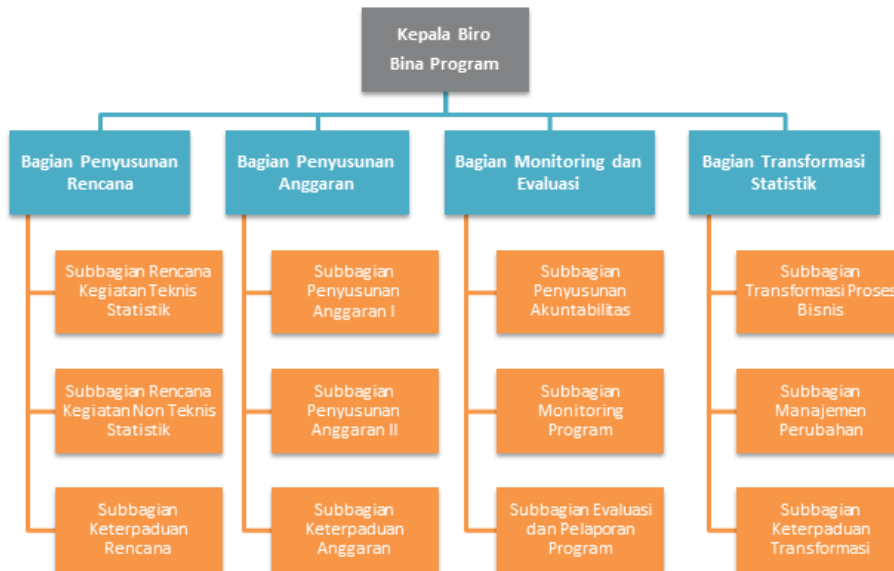
### **c. Susunan Organisasi**

Sebelum diberlakukannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Biro Perencanaan bernama Biro Bina Program. Struktur organisasi Biro Bina Program terdiri dari 4 Bagian yang dikepalai Eselon III/Kepala Bagian dan tiap bagian terdiri dari 3 (tiga) eselon IV/Kepala Sub Bagian. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tentang penyederhaan birokrasi sampai 2 level (Eselon II), maka BPS mengeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tanggal 17 Desember 2020. Dalam Peraturan Badan tersebut, susunan organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan tidak lagi terdiri dari bagian-bagian tetapi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut langsung berada di bawah Kepala Biro Perencanaan.

Jabatan fungsional yang ada di Biro Perencanaan sejak akhir 2020 terdiri dari :

- Fungsional Perencana : Ahli Madya dan Ahli Muda
- Fungsional Analis Anggaran : Ahli Madya dan Ahli Muda

- Fungsional Statistisi : Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
- Fungsional Arsiparis : Pelaksana Lanjutan
- Fungsional Umum



**Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Bina Program Sebelum Pemberlakuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020**



**Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020**

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

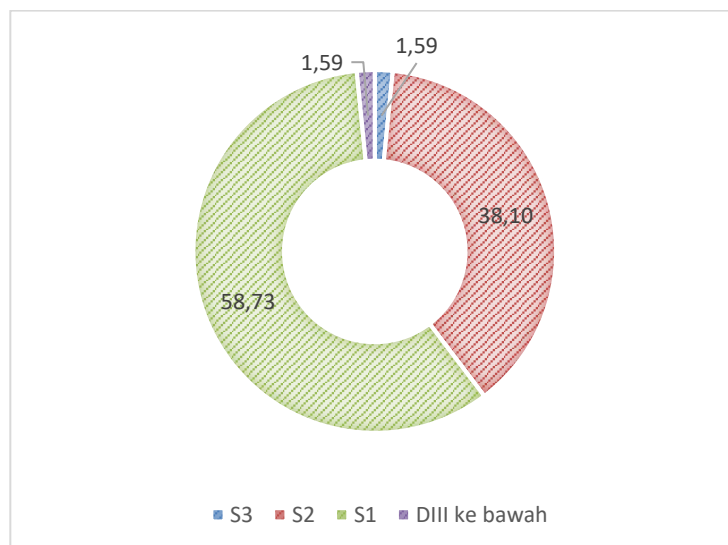


Dengan adanya Undang-Undang Statistik maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

### 1.3 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. Jumlah pegawai di lingkup Biro Perencanaan kondisi Desember 2022 yaitu sebanyak 63 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di Biro Perencanaan berpendidikan S1/ sederajat dan S2. Dari 63 orang pegawai di Biro Perencanaan, tercatat sebanyak 1 pegawai berpendidikan S3, 24 pegawai berpendidikan S2, 37 pegawai berpendidikan S1/ sederajat, dan 1 pegawai berpendidikan DIII ke bawah. Proporsi pegawai Biro Perencanaan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Proporsi Pegawai Biro Perencanaan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

Diantara pegawai tersebut sampai dengan kondisi bulan Desember 2022, sebanyak 2 orang sedang menjalani Tugas Belajar pada jenjang pendidikan S3, 2 orang sedang menjalani Tugas Belajar pada jenjang pendidikan S2 dan 1 orang sedang menjalani Cuti Di luar Tanggungan Negara (CLTN).

Pada awal tahun sesuai DIPA-054.01.1.018576/2021, Biro Perencanaan menerima pagu sekitar Rp. 21,5 miliar dalam rupiah murni. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 3 *output*. Pagu paling besar dialokasikan untuk *output* Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp. 13,4 miliar atau 62,36 persen dari total anggaran Biro Perencanaan. Selanjutnya *output* Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 8,03 miliar (37,24%) dan *output* Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 85,47 juta (0,40%).

Pada tahun 2022, BPS melakukan revisi DIPA sebanyak 17 kali. Pagu akhir Biro Perencanaan sebesar Rp.10,3 miliar atau berkurang sebesar Rp.11,2 miliar. Pengurangan ini diakibatkan beberapa hal yaitu realokasi anggaran *Automatic Adjustment* ke BA BUN, realokasi anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja gaji, dan realokasi ke BPS Daerah untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan non operasional di BPS Daerah.

**Tabel 1. Alokasi Pagu Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2022 (dalam jutaan rupiah)**

Klasifikasi Rincian <i>Output</i> /Rincian Output	Pagu Awal		Pagu Akhir	
	Pagu	% thd Pagu Total	Pagu	% thd Pagu Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2881.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>21.559,35</b>	<b>100,00</b>	<b>10.324,51</b>	<b>100,00</b>
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.029,68	37,24	4.612,48	44,68
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	85,47	0,40	23,00	0,22
961 Layanan Reformasi Kinerja	13.444,20	62,36	5.689,03	55,10
<b>Total Pagu Biro Perencanaan</b>	<b>21.559,35</b>	<b>100,00</b>	<b>10.324,51</b>	<b>100,00</b>

#### 1.4 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II BPS di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik. Regulasi tersebut memberikan jaminan bagi Biro Perencanaan untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan pada bidang pengelolaan anggaran dan kinerja baik di pusat maupun di daerah.

Selain dukungan regulasi, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki menjadi salah satu potensi Biro Perencanaan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2022, pegawai di Biro Perencanaan didominasi pegawai dengan pendidikan S1 keatas. Dukungan SDM yang kuat dapat

dimaksimalkan oleh Biro Perencanaan untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan tugasnya. Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Biro Perencanaan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan sarana penunjang berupa *laptop* untuk pegawai di Biro Perencanaan diharapkan dapat mendukung pekerjaan sehari-hari.

Adanya kebijakan eksternal seperti *automatic adjustment* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi perencanaan pelaksanaan kegiatan di BPS. Beberapa kegiatan survei dihentikan dan sebagian lainnya harus mengalami beberapa penyesuaian dari sisi perencanaan. Selain itu, adanya kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 juga memengaruhi beberapa perencanaan teknis maupun anggaran BPS sehingga perlu dilakukan penyesuaian strategi khususnya dalam akselerasi penyerapan anggaran BPS. Ketatnya proses revisi anggaran Regsosek yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) juga menjadi salah satu *constraint* dalam penyerapan anggaran BPS.

### **1.5 Sistematika Penyajian Laporan**

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan Pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; dan sistematika penyajian laporan.

**Bab II** Perencanaan Kinerja Pada bab ini disajikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Perencanaan; rencana strategis; dan perjanjian kinerja Biro Perencanaan.

**Bab III** Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini disajikan analisis capaian kinerja Biro Perencanaan; prestasi dan inovasi; realisasi dan efisiensi anggaran tahun berjalan.

**Bab IV** Penutup Pada bab ini disajikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

Lampiran

**2**

**PERENCANAAN  
KINERJA**

---





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Dalam melakukan tugasnya selama lima tahun, Biro Perencanaan telah menyusun Renstra Biro Perencanaan tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Pada awal tahun 2022, Biro Perencanaan melakukan reviu Renstra Biro Perencanaan untuk periode 2020-2024. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran Biro Perencanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Utama. Renstra Biro Perencanaan tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Perencanaan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Perencanaan yang tertuang dalam Renstra Biro Perencanaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### a. Visi

Biro Perencanaan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel”.

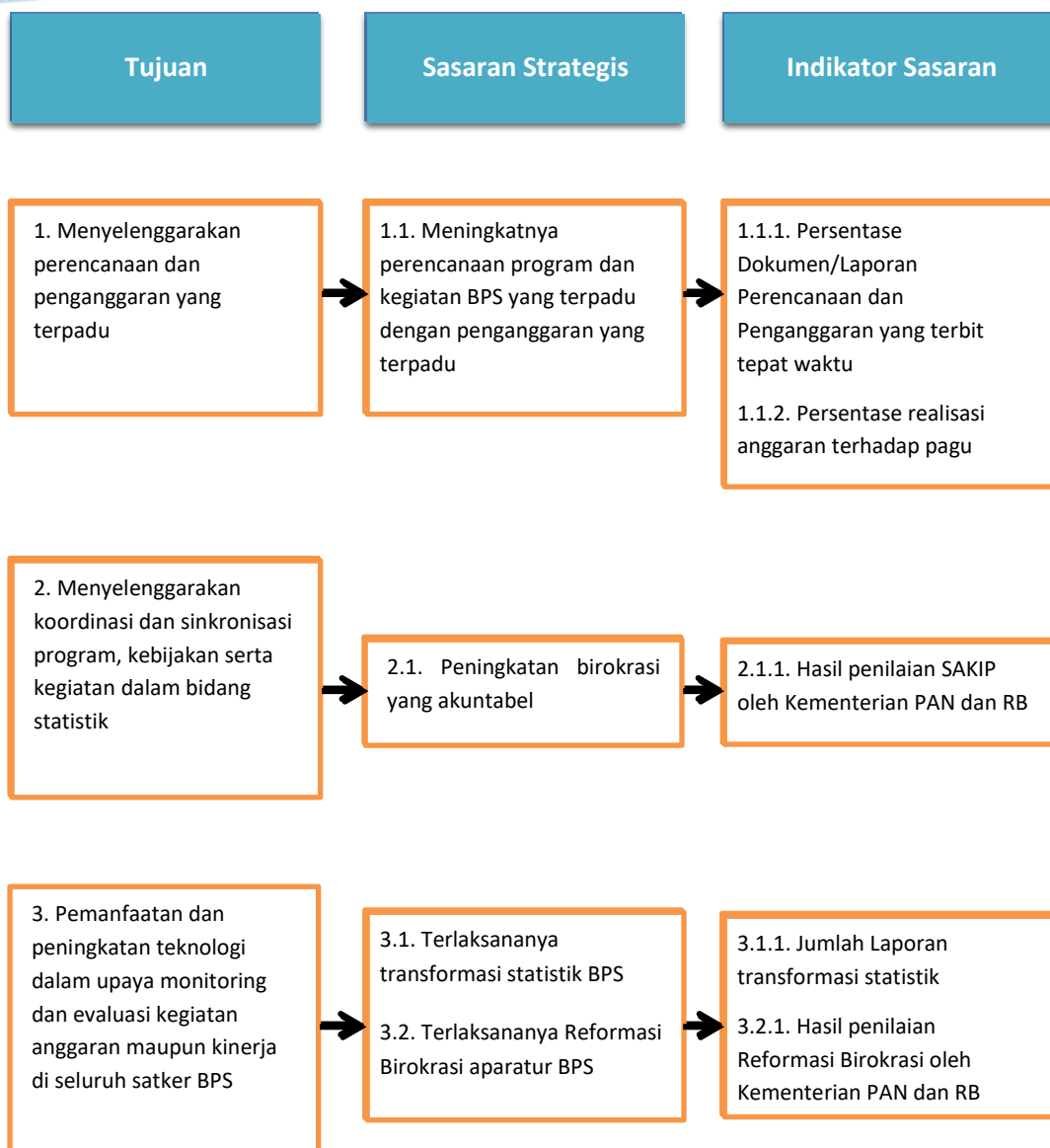
#### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Perencanaan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
- 2) Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
- 3) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan
- 4) Menyelenggarakan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS)*.

#### c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Perencanaan mempunyai tiga tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Bina Program tahun 2020-2024 yang mengacu dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Tujuan Biro Perencanaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.



**Gambar 4. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Perencanaan 2020-2024**

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Biro Perencanaan dapat terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Biro Perencanaan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. IKU Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan Tahun 2020-2024**

No (1)	Tujuan/Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target					
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	
1.	<b>Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>							
	SS.1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	1.1.1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	100	100	100	100	100	
		1.1.2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	95	95	95	95	95	



No (1)	Tujuan/Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target				
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)
<b>2.</b>	<b>Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</b>						
	SS.2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	2.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	78	78	78	79	80
<b>3.</b>	<b>Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik</b>						
	SS.3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.1.1. Jumlah laporan transformasi statistik	1	1	1	1	1
	SS.3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	3.2.1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	79	79	80	81	82

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Biro Perencanaan telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Biro Perencanaan dalam memenuhi tugasnya di tahun 2022. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan yang merupakan bentuk komitmen Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Utama BPS. Target kinerja Biro Perencanaan disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022**

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Satuan (5)	Target (6)
1	Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu	1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	1.1.1. Persentase dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100
			1.1.2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu		95
2	Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS	2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	2.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	78

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik	3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.1.1. Jumlah Laporan transformasi statistik	Laporan	1
		3.2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS	3.2.1. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	80



# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

---





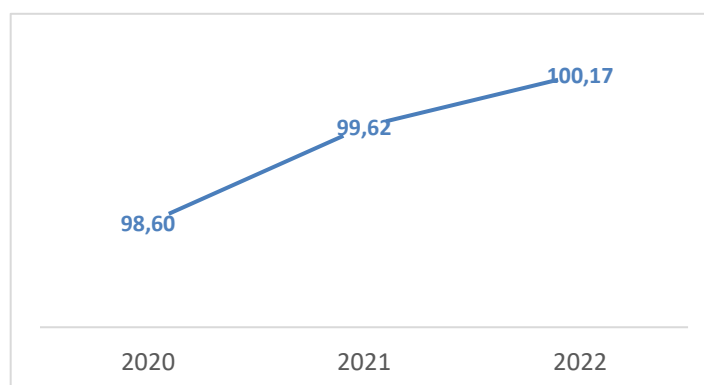
## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan merupakan perwujudan kewajiban Biro Perencanaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Biro Perencanaan 2022 dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja selama tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan. Pada bab berikut dijelaskan mengenai analisis capaian kinerja meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat.

### 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2022 adalah sebesar 100,17 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 0,55 poin dan dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Perencanaan di tahun 2022 lebih baik. Jika dibandingkan terhadap target capaian, Biro Perencanaan telah melampaui target 100,00 persen yang ditetapkan. menunjukkan bahwa kinerja Biro Perencanaan telah semakin meningkat sehingga perlu dievaluasi kembali kendala-kendala yang dialami Biro Perencanaan di tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



**Gambar 6. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2020 - 2022**

Pada periode 2020 s.d 2022, dapat dilihat pada Gambar 6, capaian kinerja Biro Perencanaan selalu mengalami peningkatan dimana pada periode awal Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan yaitu di tahun 2020, capaian kinerja Biro Perencanaan adalah sebesar 98,60 persen. Kecenderungan positif ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan selalu berusaha meningkatkan performanya setiap tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Jika dilihat menurut sasaran strategis, capaian kinerja untuk SS 1.1 memiliki capaian yang paling tinggi yaitu sebesar 101,02 persen. Selanjutnya adalah SS 3.1 dengan capaian sebesar 100 persen, kemudian SS 3.2 dengan rata-rata capaian sebesar 99,76 persen dan terakhir SS 2.1 dengan capaian sebesar 99,06 persen.

**Tabel 4. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Perencanaan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2022**

Sasaran Strategis (1)	Jumlah Indikator (2)	Capaian Kinerja (%) (3)
SS 1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	2	101,02
SS 2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1	99,06
SS 3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	1	100,00
SS 3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	1	99,76
<b>Rata-Rata Sasaran</b>		<b>100,17</b>

### 3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama Biro Perencanaan adalah “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu”. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu” dan dua IKU yaitu “Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu” dan “Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)”. Capaian indikator tujuan pertama Biro Perencanaan pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, capaian kinerja tujuan “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu” dan sasaran strategis “Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu” mengalami penurunan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar -0,07 poin.

**Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu” Tahun 2021 s.d 2022**

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>							
<b>SS1.1 Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu</b>							
Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan	Persen	100,00	100,50	100,50	100,00	99,84	99,84

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>							
<b>SS1.1 Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu</b>							
Penganggaran yang terbit tepat waktu							
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95,00	96,57	101,65	95,00	97,08	102,19
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pertama dari Tujuan Pertama</b>				<b>101,09</b>			<b>101,02</b>
<b>Capaian Kinerja Tujuan Pertama</b>				<b>101,09</b>			<b>101,02</b>

**a. Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran BPS sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka menyusun pagu Badan Pusat Statistik. Sumber dan cara pengumpulan data untuk indikator ini adalah dari Form Rencana Aksi (FRA) dan Laporan Aktivitas BPS. Cara penghitungan indikator ini yaitu dengan menghitung jumlah dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan oleh kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran yang terbit tepat waktu dibagi dengan seluruh dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan oleh kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran dikalikan 100 persen.

Indikator “Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen. Dari target tersebut, Biro Perencanaan belum memenuhi target yang diharapkan dengan capaian sebesar 99,84 persen. Tidak tercapainya kinerja ini dikarenakan dikarenakan terdapat dokumen perencanaan yang tidak dapat terbit di 2022 yaitu dokumen Satuan Biaya Masukan Lapangan (SBML). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berhasil memperoleh capaian kinerja 100,50 persen, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan capaian kinerja untuk indikator “Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu” sebesar -0,66 poin.

**Masalah/Kendala yang Dihadapi**

1. Penetapan produk hukum terkait dokumen perencanaan terlambat dikarenakan kendala koordinasi dengan *subject matter* dan *stakeholders* serta adanya eksplorasi data yang membutuhkan waktu.



2. Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi triwulanan belum maksimal dikarenakan keterlambatan serta kesalahan pengisian data dari *subject matter*.
3. Belum seluruh satker *aware* terhadap pelaporan terutama SMART dan e-Monev Bappenas.

#### Solusi Mengatasi Masalah/Kendala

1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan *stakeholders* terkait produk-produk hukum perencanaan.
2. Melakukan *reminder* dan evaluasi satker secara berkala terkait data untuk dokumen monitoring dan evaluasi triwulanan.
3. Melakukan *reminder* dan evaluasi satker secara berkala baik partisipasi maupun hasil pelaporan pada aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas untuk mengoptimalkan kelengkapan dan meminimalisir ketidaksesuaian data yang dilaporkan

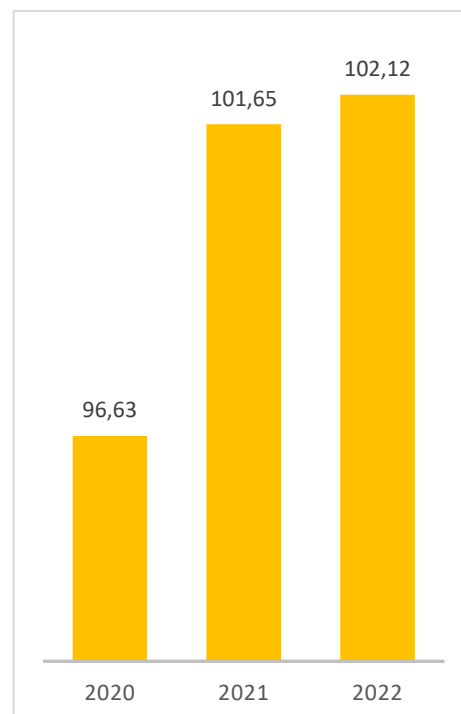
#### Rekomendasi Tahun Berikutnya

1. Mengakselerasi penyelesaian produk hukum perencanaan yang belum terbit di tahun 2022.
2. Pembinaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran untuk unit kerja baik di BPS Pusat maupun di BPS Daerah.

#### b. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektifitas anggaran BPS sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan pagu di tahun berikutnya. Sumber data untuk pengukuran kinerja indikator ini adalah dari data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Cara penghitungan indikator ini yaitu Jumlah realisasi anggaran Badan Pusat Statistik tahun ke – n dibagi jumlah pagu Badan Pusat Statistik tahun ke – n dikalikan dengan 100%.

Indikator “Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)” pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,00 persen. Dari target tersebut, Biro Perencanaan telah memenuhi target yang diharapkan dengan capaian sebesar 97,08 persen dan capaian kinerja 102,12 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berhasil memperoleh capaian kinerja 101,65 persen, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian



**Gambar 7. Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu Tahun 2020-2022**

kinerja untuk indikator “Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)” sebesar 0,54 persen.

#### **Masalah/Kendala yang Dihadapi**

1. Adanya tambahan anggaran yang berasal dari BA BUN untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di triwulan III.
2. *Automatic Adjustment* (AA) di tahun 2022 sebanyak 2 kali membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan penyesuaian kembali dari perencanaan awal.
3. Terjadi kekurangan pagu belanja pegawai BPS kurang dikarenakan anggaran belanja pegawai yang terdampak AA.
4. Terdapat perubahan proses pelaksanaan survei dari *subject matter* sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dari perencanaan awal.

#### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

1. Akselerasi realisasi anggaran Pendataan Awal Regsosek 2022 agar dapat diserap secara optimal sampai dengan akhir tahun 2022.
2. Revisi anggaran sebagai bentuk penyesuaian kegiatan setelah anggaran dilakukan AA.
3. Berkoordinasi dengan DJA untuk membuka blokir *automatic adjustment* untuk memenuhi kekurangan pagu belanja pegawai BPS.
4. Berkoordinasi dengan *subject matter* terkait penyesuaian kegiatan dan anggaran akibat adanya perubahan proses bisnis.

#### **Rekomendasi Tahun Berikutnya**

1. Perbaiki perencanaan dan penganggaran dengan melakukan reviu DIPA secara periodik dan segera melakukan revisi anggaran hasil reviu.
2. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar anggaran yang diberikan catatan (tanda blokir) pada DIPA.
3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

### **3.1.2 Capaian Kinerja Tujuan Kedua**

Tujuan kedua Biro Perencanaan adalah “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS”. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya birokrasi yang akuntabel”

dan satu IKU yaitu “Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB”. Capaian indikator tujuan kedua Biro Perencanaan pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS”  
Tahun 2021 s.d 2022**

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</b>							
<b>SS2.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel</b>							
Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79,00	77,02	97,49	78,00	77,27	99,06
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pertama dari Tujuan Kedua</b>				<b>97,49</b>			<b>99,06</b>
<b>Capaian Kinerja Tujuan Kedua</b>				<b>97,49</b>			<b>99,06</b>

Berdasarkan Tabel 6, capaian kinerja tujuan “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS” dan sasaran strategis “Meningkatnya birokrasi yang akuntabel” mengalami peningkatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,57 poin. Terdapat satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan tersebut yaitu “Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB”.

Indikator “Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB” pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 78,00 poin. Dari target tersebut dan berdasarkan nilai SAKIP BPS Tahun 2022 yaitu sebesar 77,27 maka capaian kinerja Biro Perencanaan untuk indikator ini adalah sebesar 99,06 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berhasil memperoleh capaian kinerja 97,49 persen, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian kinerja untuk indikator “Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB” sebesar 1,57 poin.

#### **Masalah/Kendala yang Dihadapi**

1. Dokumen perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Model logis pohon kinerja belum sesuai dengan regulasi.
3. Aplikasi SIMONEV perlu penyempurnaan fitur untuk sesuai kebutuhan stakeholders.
4. Kualitas laporan kinerja Lembaga masih perlu perbaikan.

5. Pembinaan SAKIP belum optimal.

#### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

1. Melakukan Reviu Renstra dan IKU.
2. Memperbaiki Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.
3. Melakukan pengembangan aplikasi Simonev.
4. Melakukan peningkatan kualitas evaluasi internal.

#### **Rekomendasi Tahun Berikutnya**

1. Memperkuat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP.
2. Mengoptimalkan implementasi pohon kinerja ke semua level unit kerja BPS.
3. Melengkapi perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya di LAKIN.

### **3.1.3 Capaian Kinerja Tujuan Ketiga**

Tujuan ketiga Biro Perencanaan adalah “Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik”. Pada tujuan ini terdapat dua sasaran strategis yaitu “Terlaksananya transformasi statistik BPS” dengan satu IKU “Jumlah laporan transformasi statistik” dan “Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS” dengan satu IKU “Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB”.

Berdasarkan Tabel 7, capaian kinerja tujuan “Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik” dan sasaran strategis “Terlaksananya transformasi statistik BPS” untuk tahun 2022 adalah sebesar 100,00 persen. Capaian kinerja untuk tujuan ketiga dengan sasaran strategis “Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS” untuk tahun 2022 adalah sebesar 98,40 persen.

#### **a. Jumlah laporan transformasi statistik**

Sasaran “Terlaksananya Transformasi Statistik BPS” merupakan sasaran yang baru di periode Renstra 2020-2024. Pada periode Renstra 2015-2020, indikator kegiatan transformasi statistik masih tergabung dalam indikator “Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi dan Statcap Cerdas yang Terbit Tepat Waktu” yang digunakan untuk mengukur sasaran “Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS”. Penggunaan sasaran “Terlaksananya Transformasi Statistik BPS” pada periode Renstra 2020-2024 diharapkan dapat lebih menajamkan *output* Biro Perencanaan mengingat pentingnya program Transformasi BPS sebagai *booster* pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dimana pembiayaan program transformasi BPS berasal dari anggaran khusus yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dari APBN. Selama periode tersebut, beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan program transformasi yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup seluruh pilar

transformasi, yaitu pilar transformasi statistik, pilar transformasi teknologi informasi (TI) serta pilar transformasi sumber daya manusia (SDM) dan organisasi. Indikator “Jumlah laporan transformasi statistik” pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah satu laporan. Dari target tersebut dan berdasarkan realisasi jumlah laporan transformasi statistik yaitu sebanyak satu laporan, maka capaian kinerja Biro Perencanaan untuk indikator ini adalah sebesar 100,00 persen atau tercapai sesuai target.

**Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik”**

**Tahun 2021 s.d 2022**

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik</b>							
<b>SS3.1 Terlaksananya transformasi statistik BPS</b>							
Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	1	100,00	1	1	100,00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Srategis Pertama dari Tujuan Ketiga</b>				<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>SS3.2 Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS</b>							
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80,00	78,72	98,40	80,00	79,81	99,76
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Srategis Kedua dari Tujuan Ketiga</b>				<b>98,40</b>			<b>99,76</b>
<b>Capaian Kinerja Tujuan Ketiga</b>				<b>99,20</b>			<b>99,76</b>

**Masalah/Kendala yang Dihadapi**

1. Respon responden perusahaan dalam rangkaian Pilot EWS 2022 masih kurang
2. Terbatasnya waktu untuk penilaian mandiri dan penilaian dokumen kegiatan dalam rangkaian EPSS
3. Pelatihan Tim Penilai Badan secara *online* dirasa kurang efektif oleh sebagian besar TPB.
4. Keterbatasan waktu anggota tim kerja dalam menyelesaikan program kerja transformasi statistik

5. Sistem statistik terintegrasi masih dalam pengembangan jadi belum bisa dimanfaatkan secara penuh dan optimal.
6. Penyusunan tata kelola *big data* membutuhkan masukan / review dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan, standar, dan prosedur yang disusun relevan dan layak diterapkan di BPS

#### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

1. Menyusun *respondent management* untuk meningkatkan *engagement* dari perusahaan.
2. Koordinasi lebih diperkuat dalam tim kerja transformasi statistik.
3. *Refreshing* pelatihan TPB pusat secara *hybrid* sebelum penilaian dokumen dimulai

#### **Rekomendasi Tahun Berikutnya**

1. *Respondent management* pelaksanaan EWS memerlukan dukungan *top level management* BPS.
2. Pemetaan kembali anggota tim ews dan segera membuat reuiu SK tim
3. Perlu dilakukan pembahasan perluasan *coverage* Business Characteristic Survey (BCS) dengan tim kerja

#### **b. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB**

Indikator “Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB” pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80,00 poin. Dari target tersebut dan berdasarkan nilai RB BPS Tahun 2021 yaitu sebesar 79,81 maka capaian kinerja Biro Perencanaan untuk indikator ini adalah sebesar 99,76 persen.

Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB No.B/653/RB.06/2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS telah terdapat upaya untuk mewujudkan tata kelola reformasi birokrasi agar lebih baik, namun upaya-upaya tersebut belum diikuti dengan implementasi yang baik. Beberapa kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan di tahun 2022 khususnya untuk Sekretariat RB yang berada di bawah Biro Perencanaan adalah sbb:

- a. Penyempurnaan struktur tim RB BPS dan tata kelola pelaksanaan RB
- b. Penetapan *Quick Wins* BPS Tahun 2022
- c. Penyusunan Strategi Pelaksanaan RB BPS 2020-2024
- d. Reviu Road Map RB BPS 2020-2024
- e. Penyusunan Rencana Kerja RB BPS Tahun 2022
- f. Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2022
- g. Pendampingan Penilaian Satker Zona Integritas (ZI)

- h. Penyusunan Program Intervensi
- i. *Leadership Training* yaitu *Leading a National Statistics Office Workshop (LANSOW)*
- j. Program *Capacity Building, Workshop, dan Knowledge Sharing*
- k. Pembangunan Sistem Pengelolaan Manajemen Perubahan (SIPMANNER)

#### **Masalah/Kendala yang Dihadapi**

1. Belum semua PMO unit kerja melakukan finalisasi dan penetapan dokumen *project plan*
2. Reviu Roadmap RB belum dibahas dengan bidang-bidang CTO karena padatnya jadwal personil CTO untuk penyelesaian pekerjaan rutin
3. Dari 3 satker usulan WBBM, belum ada yang berhasil mendapat predikat WBBM sehingga perlu dikaji kembali mengenai proses pembinaan ZI khususnya untuk BPS daerah.
4. Pelaksanaan program-program RB masih belum menjadi prioritas pada level eksekusi
5. Beberapa *stream* pekerjaan tidak sejalan dengan kompetensi atau keahlian *subject matter* , akibatnya pencapaian *output* tidak optimal dan tidak sesuai target awal
6. Jadwal pelaksanaan yang berbarengan dengan program prioritas organisasi menjadi tantangan pada implementasi dan eksekusi di lapangan.
7. SDM yang *diassign* dalam tim kerja RB merupakan SDM yang beban kerja pada pekerjaan utama tinggi dan sering menjadi *keyperson* sehingga koordinasi dan pembagian waktu menjadi tantangan.
8. Pembagian peran antar tim (misal antara TPI dan Tim RB) terkadang tumpang tindih atau tidak ada yang mengerjakan seperti pembinaan Zona Integritas ada di tanggung jawab siapa
9. Fungsi dan peran Ketua Bidang pada CTO tidak efektif dan tidak optimal, karena banyaknya beban kerja di waktu yang bersamaan.

#### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

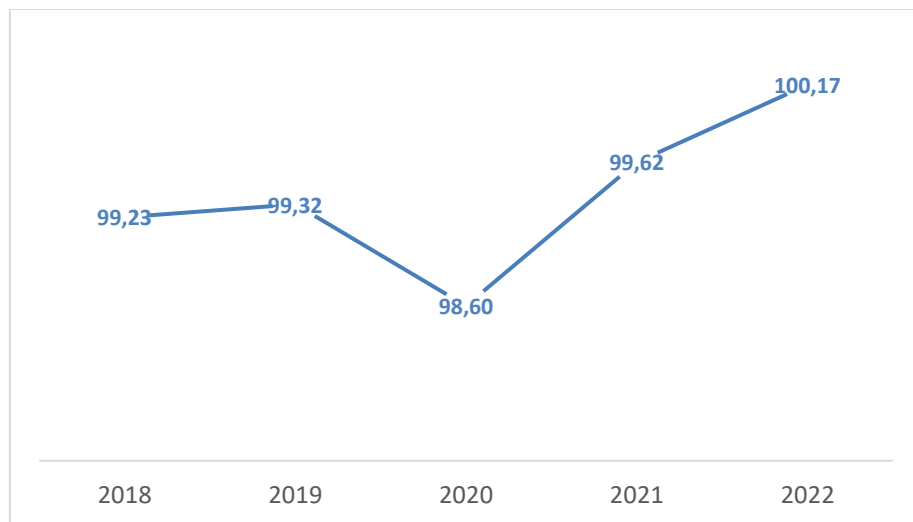
1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja RB BPS
2. Melakukan pembinaan ZI kepada satker-satker yang diusulkan
3. Perbaiki tata kelola tim kerja RB

#### **Rekomendasi Tahun Berikutnya**

1. Memperkuat tata kelola tim kerja RB
2. Melakukan monev dan pengawasan pelaksanaan program kerja RB
3. Bekerjasama dengan inspektorat dalam penguatan ZI di BPS Daerah.

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022

Dalam kurun waktu lima tahun, capaian kinerja Biro Perencanaan terhadap total cukup fluktuatif. Realisasi capaian kinerja terendah ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,60 persen. Hal ini juga dikarenakan tahun 2020 merupakan periode pertama dari Renstra 2020-2024 sehingga merupakan nilai *baseline*. Capaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan secara terus menerus berusaha meningkatkan *performa* dan kinerjanya dalam mencapai tujuan.



Gambar 8. Capaian Kinerja Biro Perencanaan 2018 s.d 2022

### 3.3 Prestasi dan Inovasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, Biro Perencanaan mendapatkan penghargaan internal dari Kepala BPS sebagai Unit Pengolah dengan Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2021 Terbaik III.



Gambar 9. Piagam Penghargaan Kearsipan

Selain prestasi tersebut, Biro Perencanaan juga telah berkontribusi dalam inovasi di tingkat Lembaga. Beberapa inovasi tersebut antara lain:

1. Pembangunan aplikasi Back Office Seluruh Indonesia (BOS Selindo)



Back Office Selindo (BOS) adalah Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dalam menyertai siklus APBN di lingkungan Badan Pusat Statistik. Terdiri dari modul Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi, secara simultan di tingkat pusat dan daerah (517 satker).

2. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Manajemen Perubahan (SIPMANNER)

Sistem Informasi Pengelolaan Manajemen Perubahan (SIPMANNER) adalah sistem yang mengintegrasikan pengelolaan manajemen perubahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian. SIPMANNER digunakan oleh *Change Champion* di unit kerja Eselon II BPS Pusat dan BPS Daerah untuk pengelolaan rencana kerja manajemen perubahan di unit kerja masing-masing. Aplikasi SIPMANNER terus dilakukan penyempurnaan menyesuaikan tata kelola manajemen perubahan serta perbaikan *bug*.

3. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) adalah sistem informasi yang digunakan untuk pemantauan capaian kinerja di masing-masing unit kerja Eselon I, II, dan III. Pada tahun 2022 dilakukan penambahan fitur pemantauan target dan realisasi anggaran untuk menjawab rekomendasi Kementerian PAN&RB.

4. Penyempurnaan aplikasi iPlan BPS

Aplikasi iPlan adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu *subject matter* dalam pengajuan usulan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun 2022, dilakukan penyempurnaan iPlan antara lain penambahan fitur untuk cetak laporan RAB dan TOR, penyesuaian rate SBM 2023, penyesuaian format output sesuai regulasi, dll.

### 3.4 Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Tabel 8. Realisasi Kinerja Berdasarkan IKU Biro Perencanaan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2022			Realisasi	2022		
		Target				%Capaian Kinerja		
		Target Renstra 2022	Target PK 2022	Target Renstra 2024		Terhadap Target Renstra 2022	Terhadap Target PK 2022	Terhadap Target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan	Persen	100,00	100,00	100,00	99,84	99,84	99,84	99,84

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2022			Realisasi	2022		
		Target				%Capaian Kinerja		
		Target Renstra 2022	Target PK 2022	Target Renstra 2024		Terhadap Target Renstra 2022	Terhadap Target PK 2022	Terhadap Target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penganggaran yang terbit tepat waktu								
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95,00	95,00	95,00	97,08	102,12	102,12	102,12
Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78	78	80	77,27	99,06	99,06	96,59
Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80	80	82	79,81	99,76	99,76	97,33

### 3.5 Realisasi dan Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2022

Pada awal tahun sesuai DIPA-054.01.1.018576/2021, Biro Perencanaan menerima pagu sekitar Rp. 21,56 miliar dalam rupiah murni. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 3 output. Pagu paling besar dialokasikan untuk output Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp. 13,44 miliar atau 62,36 persen dari total anggaran Biro Perencanaan.

**Tabel 9. Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Akhir Biro Perencanaan Tahun 2022**

No.	Program/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)	Pagu Awal	Pagu Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>054.01.WA Program Dukungan Manajemen</b>	<b>21.559.350.000</b>	<b>10.324.508.000</b>
	<b>2881.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>21.559.350.000</b>	<b>10.324.508.000</b>
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (2881.EBD.952)	8.029.676.000	4.612.476.000
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (2881.EBD.953)	85.472.000	23.000.000
3	Layanan Reformasi Kinerja (2881.EBD.961)	13.444.202.000	5.689.032.000

Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran dialokasikan sebesar Rp. 8,03 miliar (37,25%) dan output Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 85,47 juta (0,39%). Sampai dengan kondisi

31 Desember 2022, BPS telah melakukan revisi DIPA sebanyak 17 kali. Perbandingan pagu awal dan akhir yang dikelola oleh Biro Perencanaan terdapat pada Tabel 9.

Penyerapan anggaran untuk KRO 2881.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal di tahun 2022 sebesar Rp. 9.847.281.897 atau 95,42 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 5,79 persen. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan program disajikan pada Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10, sasaran strategis “meningkatnya birokrasi yang akuntabel” memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu 99,97 persen dan sasaran strategis “terlaksananya transformasi statistik BPS” memiliki persentase realisasi anggaran terendah yaitu 89,17 persen.

**Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2022**

Program	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dukungan Manajemen</b>	SS 1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	4.612.476.000	4.526.103.517	98,13
	SS 2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	23.000.000	22.992.185	99,97
	SS 3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.265.679.000	2.912.082.291	89,17
	SS 3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	2.423.353.000	2.390.883.904	98,66
<b>Total</b>		<b>10.324.508.000</b>	<b>9.851.061.897</b>	<b>95,42</b>

Pada tahun 2022, Biro Perencanaan juga telah melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran. Tabel 11 menunjukkan bahwa terdapat dua sasaran strategis yang memiliki nilai capaian kinerja lebih tinggi dibanding realisasi anggaran yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada dua sasaran strategis tersebut. Berdasarkan rata-rata sasaran, capaian kinerja Biro Perencanaan lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran yang menunjukkan adanya upaya efisiensi anggaran di tahun 2022.

**Tabel 11. Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Nilai Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2022**

Sasaran Strategis (1)	Capaian Kinerja (%) (2)	Realisasi Anggaran (%) (3)	Nilai efisiensi (%) (4)
SS 1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	101,02	98,13	50,07
SS 2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	98,74	99,97	49,97
SS 3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	100,00	89,17	50,27
SS 3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	98,40	98,66	49,99
<b>Rata-rata sasaran</b>	<b>99,83</b>	<b>95,42</b>	<b>50,11</b>

Upaya efisiensi yang dilakukan Biro Perencanaan antara lain:

1. Kegiatan pembinaan seperti pembinaan SAKIP dan ZI dilakukan secara *online*.
2. Proses pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial seperti pelatihan dan *refreshing* Tim Penilai Badan dilakukan secara *online*.
3. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan, mematikan PC, Laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan.
4. Penghematan dalam penggunaan kertas dan tinta printer.



# 4 PENUTUP

---





## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Tinjauan Umum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan BPS tahun 2022 dapat dikatakan tercapai dengan baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 99,83 persen. Dari sisi anggaran, pagu Biro Perencanaan Tahun 2022 sebesar Rp.10,32 miliar. Realisasi anggaran Biro Perencanaan 9,85 Miliar atau sebesar 95,42 persen. Capaian kinerja secara total pada sasaran strategis lebih tinggi dari persentase realisasi anggaran, dengan kata lain Biro Perencanaan telah melakukan efisiensi anggaran dengan cukup baik dengan nilai efisiensi 50,11 persen. Upaya-upaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja perlu terus dilakukan oleh Biro Perencanaan BPS, seperti terus meningkatkan upaya untuk mendapatkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP oleh Kementerian PAN & RB yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut bukan hanya sebatas untuk penilaian saja, tetapi diarahkan agar menjadi suatu budaya organisasi yang baik serta berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima kepada para pengguna data.

### 4.2 Tindak Lanjut

Dari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Perencanaan BPS Tahun 2022, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu :

1. Meningkatkan upaya untuk merealisasikan indikator sasaran strategis yang belum tercapai 100% yaitu Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu, Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB, serta Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB melalui penguatan pembinaan dan peningkatan koordinasi serta kolaborasi dengan *subject matter* selain Biro Perencanaan untuk penyusunan laporan yang terbit tepat waktu, penguatan reformasi birokrasi, dan implementasi SAKIP BPS.
2. Perlu melakukan penghitungan dan analisis kebutuhan anggaran yang lebih cermat serta menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti peraturan menteri keuangan sehingga alokasi anggaran BPS tidak terlalu *over* maupun *under budget*, misalnya ketentuan alokasi maupun pencairan gaji dan tunjangan.
3. Perlu koordinasi upaya perbaikan dengan semua *stakeholder* BPS untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN & RB atas penilaian reformasi birokrasi BPS dan SAKIP.
4. Perlu meningkatkan pelaksanaan langkah tindak lanjut hasil pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan, maupun triwulan sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat sejalan dengan pencapaian kinerja.





# LAMPIRAN





**RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN  
TAHUN 2020-2024**

<b>Instansi</b>	: Biro Perencanaan BPS
<b>Visi</b>	: Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel
<b>Misi</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;</li> <li>Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;</li> <li>Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan</li> <li>Menyelenggarakan <i>Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics</i> (Statcap-Cerdas).</li> </ol>

Tujuan (1)	Uraian (2)	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (3)	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan (4)	Sasaran Program (5)
<b>Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	1. Peningkatan sistem kerja antar Deputi, Bidang, dengan pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami	Dukungan Manajemen
		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	2. Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS	
<b>Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</b>	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	

Tujuan (1)	Uraian (2)	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (3)	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (4) (5)
<b>Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik</b>	Terlaksananya transformasi statistik BPS	Jumlah laporan transformasi statistik	4. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif
	Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN  
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Nashrul Wajdi SST., M.Si.  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Utama  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BIRO PERENCANAAN**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu			
Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu (%)	Persen	100
	Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95
Tujuan 2. Meningkatkan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS			
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78
Tujuan 3. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik			
Terlaksananya transformasi statistik BPS	Jumlah laporan transformasi statistik	Dokumen	1
Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80

**Kegiatan**

Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran

**Anggaran**

Rp. 19.220.973.000,-

Pihak Kedua



Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.  
NIP. 19640508 198702 1 002

Jakarta, 6 Juni 2022

Pihak Pertama



Dr. M. Nashrul Wajdi SST., M.Si.  
NIP. 19791213 200012 1 002



**PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN  
TERHADAP RENCANA STRATEGIS DAN PK TAHUNAN  
TAHUN 2022**

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Perjanjian Kinerja	Reali- sasi	% Capaian terhadap Renstra 2024	% Capaian terhadap PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>						
<b>SS1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu</b>						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100	100	99,84	99,84	99,84
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	95	97,08	102,12	102,12
<b>Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</b>						
<b>SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel</b>						
1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	80	78	77,27	96,59	99,06
<b>Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik</b>						
<b>SS1.3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS</b>						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Dokumen	1	1	1	100,00	100,00
<b>SS1.3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS</b>						
1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	82	80	79,81	97,33	98,40

**Tabel Analisis Capaian Kinerja Pertriwulanan 2022  
Biro Perencanaan**

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I					
	Satu an	Targ et Seta hun	Reali sasi Kum ulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
SS1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Pers en	100	8,87	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan struktur FRA</li> <li>Narasi LAKIP Sestama dan Pusat perlu menunggu data dan narasi dari SM terkait.</li> <li>SM yang terlambat mengumpulkan laporan SAS/SAKTI dan pengisian yang kurang benar</li> <li>Reviu Renstra dan IKU yang belum rilis</li> <li>Ketepatan waktu pelaporan dari satker pusat maupun daerah belum optimal</li> <li>Kualitas pelaporan data untuk menyesuaikan atau update dengan kondisi pagu terakhir belum optimal</li> <li>Belum seluruh satker aware terhadap pelaporan terutama SMART dan e-Monev Bappenas</li> <li>Lambatnya pemasukan bahan penyusunan Laporan Aktivitas BPS dari Unit Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkonsultasi dengan KemenPAN-RB terkait format FRA serta pengukuran kinerja terbaru</li> <li>Narasi LAKIP yang belum ada mengadopsi Draft Narasi Aktivitas BPS</li> <li>Reminder secara berkala untuk pengumpulan SAS dan laporan aktivitas</li> <li>Menyusun PK 2022 dengan mengacu pada DRAFT Perka IKU dan Renstra</li> <li>Monitoring terhadap pemasukan dokumen dan kualitas pelaporan data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk penyusunan LAKIP Tahun 2022 direncanakan ada brainstorming untuk seluruh satker (terutama pusat)</li> <li>Adanya percepatan waktu pengumpulan LAKIP Pusat untuk penyusunan LAKIN Biro atau sestama</li> <li>Menggunakan kertas kerja seperti LAKIN Presiden untuk pengumpulan data lebih cepat</li> <li>Membuat satu tempat repositori bersama untuk arsip PK agar seluruh Unit kerja dapat mengakses Bersama</li> <li>Koordinasi dan evaluasi berkala pemasukan dokumen dan kualitas pelaporan data</li> </ol>
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Pers en	95	13,9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya anggaran yang diblokir terutama anggaran sarana dan prasarana terkait pembangunan gedung baru yang membutuhkan izin prinsip pembangunan gedung dari presiden</li> <li>RKBMN-P baru terbit bulan maret yang menyebabkan pelaksanaan anggaran baru dapat dilakukan</li> <li>Terdapat perubahan pelaksanaan proses pelaksanaan survei dari SM yang menyebabkan perubahan pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini setkab untuk memantau proses dokumen izin prinsip</li> <li>Meminta satker yang memiliki anggaran yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan RKBMN-P untuk mempercepat proses pelaksanaan anggaran</li> <li>SM diminta untuk segera memfinalisasi perubahan proses pelaksanaan survei agar dalam pelaksanaan anggaran dapat segera berjalan sesuai perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisi DIPA untuk BPS Prov/Kab/Kota untuk menindaklanjuti penyesuaian kegiatan</li> <li>Pengajuan buka blokir anggaran khususnya anggaran pembangunan gedung</li> </ol>
Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banyak regulasi terkait SAKIP yang mengalami perubahan (evaluasi SAKIP, sistem kinerja pegawai) dan pemahaman yang masih belum sama terkait perubahan regulasi.</li> <li>Penjabaran kinerja belum sepenuhnya memperhatikan proses bisnis dan kesesuaian rumus kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kriteria terukur, relevan, dan cukup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan konsultasi dengan KemenPAN RB</li> <li>Membentuk tim SAKIP di level unit kerja BPS Pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan tim SAKIP BPS Pusat dalam SK.</li> <li>Bersama-sama dengan Inspektorat Utama memberikan pendampingan dan pembinaan SAKIP untuk unit kerja.</li> <li>Memperbaiki proses bisnis SAKIP sesuai dengan regulasi terbaru.</li> </ol>
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan program kerja Kajian Relevansi Rumah Tangga dan Perluasan Implementasi Survei Karakteristik Usaha 2023 mengalami keterlambatan penyelesaian karena padatnya pekerjaan anggota tim</li> <li>Banyaknya anggota tim IPS dan tim EWS yang beririsan mempengaruhi speed penyelesaian pekerjaan</li> <li>Sistem statistik terintegrasi masih dalam pengembangan jadi belum bisa dimanfaatkan secara penuh dan optimal.</li> <li>Pengadaan CATI masih proses, sehingga agenda kegiatan integrasi sistem CATI belum bisa dilakukan. Sampai 4 April 2022, belum ada penyedia yang memasukan penawaran sehingga pengadaan diperpanjang.</li> <li>Terkait pemanfaatan MPD, baik di internal BPS (Direktorat KTIP) maupun eksternal BPS (Kemenparekraf), masih terkendala di pengadaan yang belum selesai.</li> <li>Kanal prakom sedang finishing pengujian keamanan yang kedua, namun terkendala resources yang sedang fokus ke pengembangan SINTESIS.</li> <li>Deadline Pengembangan GS dimundurkan ke Mei, karena pada bulan April</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan tim CTO RB Bidang Transformasi Proses Bisnis</li> <li>Fokus diprioritaskan pada penyelesaian pekerjaan IPS sambil tetap memastikan progress EWS masih on the track</li> <li>Melakukan sprint pengembangan sistem statistik terintegrasi setiap minggunya</li> <li>Percepatan Proses Pengadaan melalui Tim Teknis, Tim PPK dan Tim Pokja ULP</li> <li>Mengalokasikan SDM TI yang khusus untuk menindaklanjuti hasil uji keamanan</li> <li>Menunda pengembangan GS</li> <li>Mengalokasikan waktu untuk knowledge sharing IPAS</li> <li>Menyiapkan probis dan tata kelola terkait portofolio SDGs</li> <li>Koordinasi (raise ticket) dengan pihak IBM karena terbatasnya referensi ataupun tutorial yang tersedia bebas</li> <li>Melakukan FGD dengan seluruh pihak terkait yang terlibat di dalam penyusunan tata kelola big data</li> <li>Melakukan sprint pengembangan sistem statistik terintegrasi setiap minggunya</li> <li>Percepatan Proses Pengadaan melalui Tim Teknis, Tim PPK dan Tim Pokja ULP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan project plan kegiatan Kajian Relevansi Rumah Tangga dan Perluasan Implementasi Survei Karakteristik Usaha 2023 2.</li> <li>Finalisasi bahan ajar pelatihan tim penilai badan IPS dan finalisasi SK tim EWS 2022</li> <li>Mengadakan knowledge sharing IPAS</li> <li>Reviu probis dan tata kelola terkait portofolio SDGs</li> <li>Sprint pengembangan DMS</li> <li>Melanjutkan sprint penyusunan tata kelola big data dengan mengakomodir masukan/review hasil FGD.</li> <li>Melanjutkan pengembangan datalab Sandboxing</li> <li>Menindaklanjuti hasil feedback dan melanjutkan pengembangan portofolio data ekspor impor</li> <li>Revisi POK berdasarkan KAK Analisis Kebutuhan</li> <li>Mempersiapkan tayang pengadaan CATI di bulan April</li> <li>Evaluasi proses pengadaan</li> <li>Menyelesaikan tindak lanjut hasil uji keamanan agar bisa segera public</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				<p>developer masih fokus pada penyelesaian ICS.</p> <p>8. Terdapat pergantian anggota tim IPAS, sehingga memerlukan waktu untuk knowledge sharing.</p> <p>9. Pengembangan portfolio SDGs masih menunggu probis dan tata kelola yang fix</p> <p>10. Pada pengembangan DMS, khususnya environment Hadoop Production, terdapat kendala teknis karena terbatasnya referensi ataupun tutorial yang tersedia bebas.</p> <p>11. Penyusunan tata kelola big data membutuhkan masukan/review dari berbagai pihak<sup>12</sup>.</p> <p>12. Pengembangan datalab Sandboxing sempat terkendala beberapa isu teknis.</p> <p>13. Pengembangan portofolio data ekspor impor masih menunggu feedback dari Subject Matter serta ketersediaan resource yang masih isolated.</p> <p>14. Pengadaan NSCC masih menunggu arahan dari Subject Matter terkait KAK Analisis Kebutuhan untuk revisi POK.</p> <p>15. Masih ada unit kerja yang belum menyampaikan BA pemilihan Change Champion serta penetapan tim pengelola MP unit kerja sehingga menghambat proses review draft SK tim MP BPS Pusat.</p> <p>16. Sulitnya menyesuaikan waktu pembahasan materi internalisasi dengan jadwal kegiatan rutin masing-masing anggota tim Sekretariat dan Manajemen Perubahan.</p> <p>17. Sebagian besar Change Champion yang terpilih belum mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan Sipmanner.</p> <p>18. Internalisasi dan implementasi BerAKHLAK belum optimal krn belum tersedianya regulasi dan panduan terkait core value BerAKHLAK di BPS</p>	<p>13. Mengalokasikan SDM TI yang khusus untuk menindaklanjuti hasil uji keamanan</p> <p>14. Menunda pengembangan GS</p> <p>15. Mengalokasikan waktu untuk knowledge sharing IPAS</p> <p>16. Menyiapkan probis dan tata kelola terkait portofolio SDGs</p> <p>17. Koordinasi (raise ticket) dengan pihak IBM karena terbatasnya referensi ataupun tutorial yang tersedia bebas</p> <p>18. Melakukan FGD dengan seluruh pihak terkait yang terlibat di dalam penyusunan tata kelola big data</p> <p>19. Mengirimkan reminder melalui email dan wa grup <i>Change Champion</i></p> <p>20. Pembahasan materi internalisasi melalui rapat tim Sekretariat dan Manajemen Perubahan dan diskusi melalui wa grup.</p> <p>21. Memberikan panduan penggunaan Sipmanner kepada Change Champion</p> <p>22. Telah dibuat draft Perka terkait core value BerAKHLAK BPS pengganti perka core value PIA dan telah direviu oleh fungsi Hukum.</p>	<p>13. Melakukan sprint pengembangan GS di bulan Mei</p> <p>14. Mengadakan knowledge sharing IPAS</p> <p>15. Reviu probis dan tata kelola terkait portofolio SDGs</p> <p>16. Sprint pengembangan DMS</p> <p>17. Melanjutkan sprint penyusunan tata kelola big data dengan mengakomodir masukan/review hasil FGD.</p> <p>18. Melanjutkan pengembangan datalab Sandboxing</p> <p>19. Menindaklanjuti hasil feedback dan melanjutkan pengembangan portofolio data ekspor impor</p> <p>20. Revisi POK berdasarkan KAK Analisis Kebutuhan</p> <p>21. Mempersiapkan tayang pengadaan CATI di bulan April</p> <p>22. Evaluasi proses pengadaan</p> <p>23. Menyelesaikan tindak lanjut hasil uji keamanan agar bisa segera public</p> <p>24. Melakukan sprint pengembangan GS di bulan Mei</p>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS						
1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua tim menyerahkan hasil tindak lanjut penelaahan anggaran KRO 2881.EBD sehingga revisi anggaran KRO 2881.EBD berpotensi terhambat;</li> <li>2. Keterbatasan resources di Tim SIS dalam pembuatan portal RB;</li> <li>3. Sinkronisasi jadwal antar Tim Kerja RB sulit dilakukan dan juga semakin padatnya kegiatan di SM sehingga koordinasi RB terhambat.</li> <li>4. Banyaknya jumlah kegiatan yang menjadi tanggung jawab tim Desa Cantik yang saling terintegrasi dengan kegiatan pada tim SDDI tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan tim IT,tim SDM, Descan, EWS, IPS, CM dalam tindak lanjut penelaahan anggaran;</li> <li>2. Koordinasi dengan tim kerja RB melalui internalisasi di BPS Pusat dan BPS daerah terkait tata kelola dan program kerja RB;</li> <li>3. Penambahan jumlah personil pada tim Desa Cantik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Initial meeting tim kerja RB dalam rangka penyamaan persepsi tata kelola dan finalisasi program kerja</li> <li>2. Koordinasi persiapan PMPRB 2022</li> <li>3. Akselerasi portal RB</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan II					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
SS1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Per sen	100	11,25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan rilis 2 dokumen SBML dikarenakan perlunya eksplorasi data yang rinci dan detail dalam pengkajian kertas kerja usulan SBML sehingga butuh waktu yang lebih lama</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan terkendala dengan sinkronisasi isian Subject Matter</li> <li>3. Jumlah SDM kurang memadai untuk monitoring kinerja selindo</li> <li>4. Kendala server aplikasi SMART dan e-Monev sehingga memperlambat pengolahan data</li> <li>5. Draf roadmap RB 2020-2024 yang baru belum mendapat feedback dari CTO Bidang khususnya terkait program kerja, agenda prioritas,,dll</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas dokumen SBML</li> <li>2. Berkoordinasi dengan SM untuk sinkronisasi isian data perencanaan</li> <li>3. Berkoordinasi dengan tim dari DJA terkait trouble server website</li> <li>4. Melaporkan hasil sementara penyusunan roadmap RB kepada Ketua CTO Harian BPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan penyusunan SBML dan Laporan Pagu Indikatif TA 2023 dengan mengadakan pertemuan mingguan dengan pimpinan</li> <li>2. Uji Coba pengembangan SIMONEV untuk menampilkan capaian kinerja pada dashboard es 2</li> <li>3. Melakukan perbaikan/pengembangan aplikasi SIMONEV yang telah digunakan, dengan cara berkoordinasi dengan programmer atas masukan dari pengguna aplikasi monev</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan II					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Per sen	95	40,4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tambahan automatic adjustment membuat beberapa kegiatan dibatalkan, namun karena AA bersifat blokir anggaran yang tidak mengurangi pagu BPS sehingga persentase realisasi masih termasuk AA</li> <li>Belum keluarnya izin pembangunan gedung kantor baru pada triwulan 2 untuk 6 satker sehingga proses lelang belum bisa dilakukan.</li> <li>Adanya AA pada pagu belanja 51, diperkirakan pagu belanja 51 kurang sehingga perlu tambahan anggaran belanja pegawai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>berkoordinasi dengan DJA terkait anggaran yg diblokir AA yang masih dihitung dalam persentase realisasi anggaran</li> <li>Satker yang memiliki anggaran pembangunan gedung baru mempersiapkan dokumen lelang</li> <li>Telah dilakukan penghitungan kasar terkait identifikasi total kekurangan anggaran belanja 51</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan gedung baru pada 6 satker</li> <li>Melakukan penghitungan alternatif pemenuhan belanja pegawai</li> </ol>
Tujuan 2. Meningkatkan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>Renstra Reviu masih belum terbit sehingga satker di daerah masih kesulitan untuk menyusun dokumen SAKIP</li> <li>Pengembangan Aplikasi SIMONEV hanya dikerjakan oleh 1 orang sehingga progresnya lambat</li> <li>Kekurangan jumlah SDM Akuntabilitas, monitoring sulit dilakukan</li> <li>Kurangnya pemahaman SAKIP pada Tim SAKIP Unit Kerja di BPS Pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi bersama Tim Renstra Biroren, PK Unit Kerja dan Satker sudah mengacu pada Perka IKU Terbaru</li> <li>Tim Kerja SAKIP BPS Level Unit Kerja, menggunakan Surat Tugas ttd Eselon I</li> <li>Pendampingan terhadap pengisian FRA Unit Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama-sama dengan Inspektorat Utama memberikan pendampingan SAKIP untuk unit kerja</li> <li>Pembahasan Draft Paparan Evaluasi SAKIP 2022 serta penyiapan bukti dukung</li> <li>Pengembangan Aplikasi Simonev sesuai rekomendasi Kemenpan RB</li> <li>Pembentukan grup WA unit kerja Pusat</li> </ol>
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>Padatnya pekerjaan anggota tim kerja utk project transformasi sehingga menghambat koordinasi</li> <li>Sistem statistik terintegrasi masih dalam pengembangan jadi belum bisa dimanfaatkan secara penuh dan optimal. Dukungan Sistem Pendukung CATI mengalami kendala akses atau pertukaran data/parameter</li> <li>Terkait pemanfaatan MPD masih terkendala di pengadaan yang belum selesai.</li> <li>Penyusunan tata kelola big data membutuhkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan tim kerja terkait project transformasi untuk segera mengakeselerasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>Berkoordinasi dengan Biro Humas dan Hukum terkait dengan terlambatnya harmonisasi draft Perban EPSS.</li> <li>Melakukan sprint pengembangan sistem statistik terintegrasi</li> <li>Percepatan Proses Pengadaan melalui Tim Teknis, Tim PPK dan Tim Pokja ULP</li> <li>Mengalokasikan SDM TI yang khusus untuk menindaklanjuti hasil uji keamanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengkomunikasikan isu project transformasi kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan selanjutnya</li> <li>Memperkuat koordinasi tim kerja dan menegaskan kembali role masing-masing anggota tim</li> <li>Eksekusi teknis integrasi sistem</li> <li>Melakukan evaluasi proses pengadaan</li> <li>Menyusun draft regulasi pembangunan agen perubahan BPS.</li> <li>Mengadakan internalisasi kepada</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan II					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				masukan / review dari berbagai pihak 5. Proses pengesahan regulasi (Perka manajemen talenta, Perka SKJ, dan Perka Assessment Center, dan harmonisasi Perban EPSS) memerlukan waktu relatif lama. 6. Tata kelola pembangunan agen perubahan BPS belum sesuai dengan PermenPAN RB No. 27 Tahun 2014 7. Pemanfaatan Sipmanner belum optimal karena belum dilakukan internalisasi Sipmanner kepada Change Champion unit kerja	5. Melakukan FGD dengan seluruh pihak terkait yang terlibat di dalam penyusunan tata kelola big data 6. Telah disusun draft pedoman pembangunan agen perubahan BPS yang disesuaikan dengan PermenPAN RB No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. 7. Telah dirancang internalisasi kegiatan manajemen perubahan termasuk pengoptimalan pemanfaatan Sipmanner	Change Champion secara online dilanjutkan dengan Workshop Change Management

SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS

1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80	0	1. Rilis hasil LHE RB 2021 oleh Kementerian PANRB terlambat (April 2022) sehingga perencanaan strategi pelaksanaan RB 2022 yang telah dibuat sebelumnya harus disinkronisasi kembali dengan rekomendasi Kementerian PANRB tahun 2021; 2. Jadwal PMPRB 2022 yang cukup pendek sementara kegiatan di SM juga semakin padat dikhawatirkan semakin menghambat proses koordinasi antara CTO-PMO dan juga PK. 3. Adanya Automatic Adjustment membuat anggaran tata kelola RB seperti paket meeting, honor narasumber, serta perjalanan dinas diblokir untuk automatic adjustment	1. Melakukan koordinasi dengan PMO unit kerja untuk akselerasi penyelesaian dokumen project plan; 2. Berkoordinasi dengan TPI terkait PMPRB 2022; 3. Memetakan anggaran-anggaran prioritas terkait project RB 4. Berkoordinasi dengan tim RBKunwas Kementerian PANRB terkait pelaksanaan PMPRB	1. Berkoordinasi dengan tim Kementerian PANRB terkait persiapan pelaksanaan evaluasi RB (indepth interview); 2. Prioritisasi anggaran untuk pelaksanaan program kerja prioritas
--	------	----	---	--	---	--

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
SS1.1. Meningkatkan perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Per sen	100	14,26	1. Penyusunan dokumen SBML untuk pelaksanaan petugas survey/kegiatan Kerjasama dihentikan	1. Pada triwulan III 2022, Biro Perencanaan menghasilkan 1 laporan/dokumen yang tidak ada dalam kertas	1. Tim Penyusunan Rencana agar melengkapi bukti notula yang menjelaskan bahwa

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
yang terbit tepat waktu				karena prioritas penyelesaian SBML difokuskan untuk dokumen SBML Kegiatan Statistik K/L sehingga dikhawatirkan indikator ini tidak akan mencapai target s.d akhir 2022 2. Dokumen self assessment belum bisa disusun karena belum ada petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen tsb 3. Data dari SM untuk input SAS, e-monev Bappenas beberapa masih belum valid sehingga menghambat proses finalisasi data untuk dikirim	kerja awal penetapan target kinerja yaitu dokumen Reviu Perka 97 Tahun 2022 sehingga dokumen ini dapat dimasukkan dalam kertas kerja penghitungan tw 3 menggantikan SBML Kerjasama yang kemudian tidak lagi dihitung dalam target kinerja Biro Perencanaan. 2. Memperkuat komunikasi dengan SM melalui grup WA 3. Melakukan konfirmasi ke SM untuk isian yg belum sesuai 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dan berkala dengan tim Monev Bappenas	SBML Kerjasama tidak dilanjutkan penyusunannya. Kertas kerja penghitungan capaian kinerja agar dijelaskan terkait hal ini. 2. Pengembangan SIMONEV terkait dashboard capaian kinerja Unit Kerja Pusat agar pemantauan kinerja menjadi lebih baik 3. Mengusulkan kepada tim SMART di DJA agar KL dapat mendownload seluruh hasil pelaporan satker pada level RO 4. Berkoordinasi dengan tim e-Monev di Bappenas untuk dapat memperoleh raw data hasil pelaporan satker baik di level komponen/RO untuk memudahkan evaluasi.
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Per sen	95	42,65	1. adanya tambahan anggaran untuk kegiatan Regsosek sehingga pagu total bertambah dan sebagian besar anggaran baru dapat direalisasikan di tw IV	1. Melakukan pemantauan berkala penyerapan anggaran kegiatan Regsosek 2. Mendorong satker untuk segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa di bulan September 2022	1. melakukan monitoring realisasi anggaran khususnya anggaran kegiatan regsosek setiap bulannya untuk melihat potensi realisasi anggaran keseluruhan BPS.
Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78	0	1. Laporan Kinerja masih belum menampilkan analisis capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 2. Pohon Kinerja baru tersedia untuk Kedeputan Disjas dan masih perlu disempurnakan	1. Laporan Kinerja telah diperbaiki sesuai dengan temuan evaluator 2. Laporan Kinerja TW I, II, dan Laporan Pekerjaan Pimpinan telah tersedia 3. Seluruh bukti dukung telah disimpan dalam folder khusus tindakanjutt, dan akan dikirim ke evaluator Menpan	1. Pembahasan template untuk Laporan Kinerja 2022 2. Pembahasan Pembinaan SAKIP Unit Kerja Pusat 3. Penyempurnaan petunjuk/penjelasan indikator untuk PK 2023



Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				3. Perlu tambahan bukti dukung Laporan Kinerja Triwulan I & II, serta Laporan Pekerjaan Pimpinan bulanan	menunggu pohon kinerja selesai	4. Pembentukan grup WA unit kerja Pusat
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perubahan konsep definisi pada uji coba kajian relevansi rumah tangga mengakibatkan daerah mencetak kuesioner yang belum update</li> <li>Sulitnya koordinasi karena susah mencari waktu yang tepat untuk melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait.</li> <li>Rencana jadwal sosialisasi dan refreshing EPSS sangat tergantung dengan jadwal kegiatan Regsosek.</li> <li>Pelaksanaan fullboard EWS mengalami delay karena jadwal bentrok dengan kegiatan lainnya.</li> <li>Belum ditetapkannya regulasi sebagai dasar penerapan core value BerAKHLAK BPS menyebabkan terhambatnya internalisasi dan implementasi core value BerAKHLAK di lingkungan BPS.</li> <li>Belum ditetapkannya contoh perilaku BerAKHLAK yang spesifik di lingkungan BPS sehingga instrumen pengukuran budaya kerja ASN BPS belum dapat disusun.</li> <li>Turut terlibatnya sebagian besar personil tim manajemen perubahan dalam evaluasi RB oleh tim evaluator KemenPAN-RB, kegiatan regsosek, serta pelatihan revolusi mental menyebabkan beberapa kegiatan manajemen perubahan tertunda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian update kuesioner pada saat pelatihan kepada petugas</li> <li>Merencanakan fullboard EWS untuk dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2022</li> <li>membantu menyusun draft Perka BPS yang akan dijadikan dasar sebagai penerapan core value BerAKHLAK di BPS. Draft Perka tersebut juga telah di reviu oleh fungsi Hukum BPS.</li> <li>Telah dilakukan kompilasi masukan dari Change Champion setiap unit kerja mengenai contoh perilaku BerAKHLAK yang spesifik di unit kerjanya. Hasil kompilasi tersebut telah dipetakan ke dalam draft contoh perilaku BerAKHLAK yang relevan dengan BPS.</li> <li>Penundaan kegiatan tidak dapat dihindarkan karena agenda prioritas BPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>tim Pusat tetap mengirimkan softcopy update kuesioner tersebut untuk menghindari temuan pada saat audit.</li> <li>persiapan sosialisasi EPSS</li> <li>Melaksanakan fullboard EWS dengan seluruh tim EWS lintas direktorat</li> <li>Tim manajemen perubahan akan mendorong pihak-pihak terkait untuk segera menetapkan Perka BPS sebagai dasar penerapan core value BerAKHLAK di BPS.</li> <li>Akan dilakukan pembahasan dengan tim SDM untuk menentukan contoh perilaku BerAKHLAK yang relevan dengan BPS sekaligus membahas indikator implementasi contoh perilaku tersebut.</li> <li>Melakukan penyesuaian materi Workshop Change Management untuk mendorong penyelesaian beberapa kegiatan manajemen perubahan yang tertunda.</li> </ol>
SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS						
1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80	0	1. Belum semua PMO unit kerja melakukan finalisasi dan penetapan dokumen project plan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan PMO untuk mengakselerasi penyelesaian project plan</li> <li>Berkoordinasi dengan Fungsi Hukum untuk</li> </ol>	1. Memastikan kriteria peserta yang akan dilibatkan dalam LANSOW sesegera mungkin

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				2. Belum adanya pengesahan dari tim hukum tentang SK Tim RB 2022; 3. Penundaan LANSOW yang rencananya akan dilaksanakan di November 2022 memiliki beberapa risiko antara lain waktu yang terlalu mepet dengan akhir tahun, semakin padatnya jadwal di akhir tahun, dll. Perlu dilakukan identifikasi dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan LANSOW yang dipindahkan ke bulan November 2022. 4. Dashboard Desa Cantik 2022 dalam bentuk website belum selesai	mempercepat proses penyelesaian SK Tim RB 2022 3. Koordinasi antara tim LANSOW, baik secara internal maupun dengan tim ABS, serta dengan pimpinan. 4. membuat dashboard Desa Cantik dengan menggunakan google studio.	

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
SS1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100	99,84	1. Penetapan produk hukum terkait dokumen perencanaan terlambat dikarenakan kendala koordinasi dengan subject matter dan stakeholders serta adanya eksplorasi data yang membutuhkan waktu; 2. Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi triwulanan belum maksimal dikarenakan keterlambatan serta kesalahan pengisian data dari subject matter. 3. Belum seluruh satker aware terhadap pelaporan terutama SMART dan e-Monev Bappenas.	1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan stakeholders terkait produk-produk hukum perencanaan. 2. Melakukan reminder dan evaluasi satker secara berkala terkait data untuk dokumen monitoring dan evaluasi triwulanan. 3. Melakukan reminder dan evaluasi satker secara berkala baik partisipasi maupun hasil pelaporan pada aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas untuk mengoptimalkan kelengkapan dan meminimalisir ketidaksesuaian data yang dilaporkan	1. Mengakselerasi penyelesaian produk hukum perencanaan yang belum terbit di tahun 2022. 2. Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk unit kerja baik di BPS Pusat maupun di BPS Daerah
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	97,08	1. Adanya tambahan anggaran yang berasal dari BA BUN untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di triwulan III. 2. Automatic Adjustment (AA) di tahun 2022 sebanyak 2 kali membuat	1. Akselerasi realisasi anggaran Pendataan Awal Regsosek 2022 agar dapat diserap secara optimal sampai dengan akhir tahun 2022. 2. Revisi anggaran sebagai bentuk penyesuaian kegiatan setelah anggaran dilakukan AA.	1. Perbaiki perencanaan dan penganggaran dengan melakukan reuvi DIPA secara periodik dan segera melakukan revisi anggaran hasil reuvi. 2. Melengkapi dokumen yang

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				<p>perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan penyesuaian kembali dari perencanaan awal.</p> <p>3. Terjadi kekurangan pagu belanja pegawai BPS kurang dikarenakan anggaran belanja pegawai yang terdampak AA.</p> <p>4. Terdapat perubahan proses pelaksanaan survei dari subject matter sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dari perencanaan awal.</p>	<p>3. Berkoordinasi dengan DJA untuk membuka blokir automatic adjustment untuk memenuhi kekurangan pagu belanja pegawai BPS.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan subject matter terkait penyesuaian kegiatan dan anggaran akibat adanya perubahan proses bisnis.</p>	<p>dibutuhkan agar anggaran yang diberikan catatan (tanda blokir) pada DIPA.</p> <p>3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.</p> <p>5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</p>
Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78	77,27	<p>1. Dokumen perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2. Model logis pohon kinerja belum sesuai dengan regulasi.</p> <p>3. Aplikasi SIMONEV perlu penyempurnaan fitur untuk sesuai kebutuhan stakeholders.</p> <p>4. Kualitas laporan kinerja Lembaga masih perlu perbaikan.</p> <p>5. Pembinaan SAKIP belum optimal.</p>	<p>1. Melakukan Reviu Renstra dan IKU.</p> <p>2. Memperbaiki Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.</p> <p>3. Melakukan pengembangan aplikasi Simonev.</p> <p>4. Melakukan peningkatan kualitas evaluasi internal.</p>	<p>1. Memperkuat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP.</p> <p>2. Mengoptimalkan implementasi pohon kinerja ke semua level unit kerja BPS.</p> <p>3. Melengkapi perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya di LAKIN</p>
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	1	<p>1. Respon responden perusahaan dalam rangkaian Pilot EWS 2022 masih kurang</p> <p>2. Terbatasnya waktu untuk penilaian mandiri dan penilaian dokumen kegiatan dalam rangkaian EPSS</p> <p>3. Pelatihan Tim Penilai Badan secara online dirasa kurang efektif oleh sebagian besar TPB.</p> <p>4. Keterbatasan waktu anggota tim kerja dalam menyelesaikan program kerja transformasi statistik</p> <p>5. Sistem statistik terintegrasi masih dalam pengembangan jadi belum bisa dimanfaatkan secara penuh dan optimal.</p> <p>6. Penyusunan tata kelola big data membutuhkan</p>	<p>1. Menyusun respondent management untuk meningkatkan engagement dari perusahaan.</p> <p>2. Koordinasi lebih diperkuat dalam tim kerja transformasi statistik.</p> <p>3. Refreshing pelatihan TPB pusat secara hybrid sebelum penilaian dokumen dimulai</p>	<p>1. Respondent management pelaksanaan EWS memerlukan dukungan top level management BPS.</p> <p>2. Pemetaan kembali anggota Tim EWS dan segera membuat reviu SK tim</p> <p>3. Perlu dilakukan pembahasan perluasan coverage Business Characteristic Survey (BCS) dengan tim kerja</p>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				masuk / review dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan, standar, dan prosedur yang disusun relevan dan layak diterapkan di BPS.		
SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS						
1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80	79,81	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua PMO unit kerja melakukan finalisasi dan penetapan dokumen project plan</li> <li>2. Reviu Roadmap RB belum dibahas dengan bidang-bidang CTO karena padatnya jadwal personil CTO untuk penyelesaian pekerjaan rutin</li> <li>3. Dari 3 satker usulan WBBM, belum ada yang berhasil mendapat predikat WBBM sehingga perlu dikaji kembali mengenai proses pembinaan ZI khususnya untuk BPS daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan program-program RB masih belum menjadi prioritas pada level eksekusi</li> <li>5. Beberapa stream pekerjaan tidak sejalan dengan kompetensi atau keahlian subject matter , akibatnya pencapaian output tidak optimal dan tidak sesuai target awal</li> <li>6. Jadwal pelaksanaan yang berbarengan dengan program prioritas organisasi menjadi tantangan pada implementasi dan eksekusi di lapangan.</li> <li>7. SDM yang diassign dalam tim kerja RB merupakan SDM yang beban kerja pada pekerjaan utama tinggi dan sering menjadi keyperson sehingga koordinasi dan pembagian waktu menjadi tantangan.</li> <li>8. Pembagian peran antar tim (misal antara TPI dan Tim RB) terkadang tumpang tindih atau tidak ada yang mengerjakan seperti pembinaan Zona Integritas ada di tanggung jawab siapa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja RB BPS</li> <li>2. Melakukan pembinaan ZI kepada satker-satker yang diusulkan</li> <li>3. Perbaiki tata kelola tim kerja RB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat tata kelola tim kerja RB</li> <li>2. Melakukan monev dan pengawasan pelaksanaan program kerja RB</li> <li>3. Bekerjasama dengan inspektorat dalam penguatan ZI di BPS Daerah</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				9. Fungsi dan peran Ketua Bidang pada CTO tidak efektif dan tidak optimal, karena banyaknya beban kerja di waktu yang bersamaan		

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)